

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada April-Juni 2004, untuk ke 9 kalinya bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilu. Pemilu meski bukan satu-satunya sarana untuk menilai kualitas demokrasi yang lainnya adalah kebebasan (pers berpendapat, berorganisasi, dan beragama). Persamaan di depan hukum dan distribusi pendapatan yang adil. Melalui pemilu kita akan memilih wakil-wakil yang akan duduk dalam badan-badan pemerintahan (eksekutif maupun legislatif).¹

Pemilihan Umum 2004 sangatlah berbeda didalam pelaksanaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 akan berlangsung tiga kali dalam satu tahun yaitu pemilu legislatif pada tanggal 5 april 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama pada tanggal 5 juli 2004 dan putaran keduanya pada tanggal 20 september 2004 (jika diperlukan).

Antara pemilu dan lembaga legislatif memiliki hubungan yang sangat erat. Pemilu yang demokratis diduga merupakan salah satu modal dasar dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis.²

¹ Hairus Salim, *Islam dan Pemilu*, Yogyakarta, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2004, Hlm 1

² D. ... *... Pemilu ...* PT Tiga Wajana, 1991, Hlm 1

Oleh sebab itu untuk dapat terlaksananya pemilu maka tidak lepas dengan adanya partai politik (parpol). Partai Politik di dalam pemilu mempunyai peran yang sangat kuat untuk dapat terlaksananya pemilu, akan tetapi yang lebih penting adalah seberapa jauh partai politik memainkan perannya secara aktif didalam segenap proses politik bahkan di tinjau dari sejarah pemilihan umum dapat di ketahui bahwa pemilu merupakan satu-satunya cara untuk mewadahi keikutsertaan rakyat dalam pemilu melalui partai politik.

Kegiatan utama partai politik menurut Ranney adalah memilih calon melakukan kampanye dalam pemilu dan mengelola pemerintahan. Dan kegiatan lainnya: mengadakan kegiatan sosial, mendirikan organisasi pemuda guna menggerakkan pemilih baru dan merekrut pekerja dan pemimpin.

Melalui partai kita dapat memilih pemimpin bangsa, membantu menjalankan mesin pemilu, sebagai sarana kampanye politik, mengawasi kegiatan-kegiatan kaum eksternis dari kedua sisi spektrum politik. Mendorong diskusi umum tentang isu-isu penting dan yang terpenting berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. hal tersebut diatas merupakan hubungan antara pemilu dan partai politik.

Partai politik yang berfungsi sebagai kekuatan pada garda terdepan bagi perjuangan demokrasi baru kedewasaan politik dalam mencapai cita-cita pembangunan politik yang demokratis yang harus di dukung oleh segenap kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Pemilu sebagai kesempatan langka bagi partai politik harus dapat seluk-beluk berfungsi sebagai jembatan

tentang pemilu. Selain itu kebanyakan pemilih pemula adalah pelajar sekolah lanjutan tingkat atas yang umumnya buta politik. apalagi para remaja sebagai pemilih pemula yang pertama kalinya memberikan hak suaranya.

Pemilih pemula sangat menarik dikaji sebab pemilih pemula merupakan salah satu basis massa yang menjadi objek bagi partai politik untuk mengumpulkan suara. Dan pemilih pemula dianggap belum tau mengenai tindakan, tingkah laku dan persepsi mengenai pemilu, maka disini untuk mengetahui tanggapan dari pemilih dalam pemilu diambil pemilih pemula sebagai objek yang diteliti bagi penulis.

Karang taruna Bhakti merupakan organisasi pemuda yang ada di Desa Trihanggo, Dimana keanggotaan dari organisasi tersebut terdiri atas seluruh karang taruna yang ada di dusun dan ada di desa Trihanggo. Sebab didalam karang taruna Bhakti keanggotaannya mayoritas sebagai pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2004. yang mana pemilih pemula disini orang yang baru pertama kali memberikan haknya dalam pemilu legislatif 2004 ini.

Didalam penelitian pemilih pemula mengambil anggota karang taruna Bhakti Sebagai tempat penelitian Sebab dikarang taruna segala aktifitas kepemudaan dilakukan didalam karang taruna tersebut sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang ada di Desa Trihanggo untuk mengembangkan dan memajukan Desa disamping melalui dari kegiatan-kegiatan yang menjadi program Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu PKK,

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan terutama bagi pemilih pemula yang merupakan bagian dari masyarakat yang relatif lebih peka terhadap permasalahan yang di hadapi didalam sekelilingnya baik terhadap pemilu yang merupakan bagian dari masyarakat yang relatif lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi di sekelilingnya baik terhadap pemilu dan aspek-aspek politiknya. Dengan memperhatikan besarnya pengaruh golongan muda termasuk pemilih pemula tentang pemilihan umum tersebut, maka kajian tentang perilaku politik pemilih pemula sangat menarik untuk diadakan.

Didalam penelitian ini penulis sengaja mengadakan penelitian skripsi dengan judul Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2004 dengan studi kasus di Karang Taruna Bhakti Desa Trihanggo Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, karena pemilih pemula dikarang taruna Bhakti Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman jumlah pemilih pemulanya paling banyak dibandingkan dengan karang taruna ang ada didusun sebab Karang Taruna ini beranggotakan dari keseluruhan Karang taruna yang ada di dusun yang ada diwilayah Desa Trihanggo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana telah di uraikan sebelumnya maka dapat diambil perumusan masalah penelitian yaitu:

masyarakat didalam menyelenggarakan pesta demokrasi yang ada di Indonesia.

c. Manfaat Untuk Partai Politik

Sebagai sarana bagi partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan dengan adanya pemilihan umum juga dapat dijadikan sebagai pengontrol atau pengendali jalannya roda pemerintahan yang ada di Indonesia dapat merangsang partai politik untuk mengedepankan aspek rasionalitas dalam menarik simpatisan partai politik.

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk memahami masalah yang akan di teliti, maka perlu mempunyai pedoman atau landasan yang berdasarkan pada suatu teori. Sebelum penyusun lebih jauh melangkah, maka beberapa ahli mengemukakan apa yang di maksud dengan teori.

Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi Yang mengutip pendapat Kerlinggers F.N menyebutkan Bahwa: "Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dengan cara merumuskan hubungan"³ Sedangkan menurut Kontjoroningrat menyebutkan bahwa: "teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu / beberapa faktor tersebut dalam masyarakat."⁴

³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Research*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, 1989.

⁴ Kontjoroningrat, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, 1989.

1. Perilaku Politik.

Perilaku merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen-komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi tertentu, berhubungan dengan obyek sikap.⁵ maka perilaku erat sekali hubungannya dengan sikap.

Komponem perilaku atau komponen konasi dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.⁶

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu obyek tertentu. Sedangkan perilaku politik diartikan sebagai fungsi dari kondisi sosial, ekonomi dan fungsi kepentingan maka berlaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi, dan kepentingan suatu masyarakat, atau golongan dalam masyarakat tersebut.⁷

Ramlan surbakti mendefinisikan perilaku politik sebagai kegiatan yang berknaan dengan proses pembuatan, dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga

⁵ Jack Duncan, *Organizational Behavior*, Houghton mifflin Company, Boston, 1981 Hlm.92

⁶ Saifuddin Azwar, *Sikap manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1995, Hlm 27

⁷ Abdul Munir Mulkan, *Perbuatan Perilaku Politik Dan Polarisasi Umat islam 1965-1987 Dalam Perspektif Sopsiologi*, CV. Rajawali Pers, Jakarta 1989, Hlm 7

Sehingga dengan uraian diatas Perilaku Politik adalah aktivitas warga Negara bukan pemerintahan, yang berupaya untuk mengubah kebijakan pemerintah sebagai tuntutan politik yang sesuai dengan perkembangan politik yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹² Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan internal (fikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobbying, kampanye). Perilaku “yang bersifat politik” bisa ditemui dalam setiap lingkungan kelembagaan (keluarga, perusahaan, masjid dan sejenisnya). Perilaku politik juga dirancang sebagai suatu pendekatan pada ilmu politik yang menempatkan pelaku individu sebagai unit utama analisa.

Persepsi merupakan suatu factor penentu yang terdapat dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil suatu keputusan atau melakukan sesuatu tindakan atau perilaku tertentu, oleh sebab itu persepsi merupakan suatu bentuk penilaian terhadap obyek tertentu.

Dengan adanya pemilih pemula didalam pemilu maka dituntut untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk dapat mewujudkan persepsi didalam pemilu untuk dapat melakukan sesuatu keputusan yang selama ini belum pernah dilakukannya untuk mewujudkan demokrasi yang ada di Indonesia melalui pesta rakyat yaitu pemilihan umum.

¹²Pikiran rakyat. Com

harus mempunyai pedoman atau pendirian untuk memberikan suaranya oleh sebab itu tindakan yang dilakukan sebagai pemilih pemula yaitu mempunyai aturan untuk melakukan langkah pengamanan untuk sesuatu yang akan dilakukan.

Dengan adanya aturan untuk melakukan langkah maka didalam memberikan suara didalam pemilu didasari dengan sikap yang penuh tanggung jawab didalam berdemokrasi.

Menurut Jack.C Plano Perilaku politik seseorang adalah :

pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobbying.¹³

Dari uraian dan pendapat diatas bahwa perilaku politik merupakan suatu pola pikir, tindakan dari tiap individu untuk melakukan suatu proses atau bentuk yang dapat diwujudkan didalam pemerintahan. Tindakan atau pikiran yang dilakukan didalam pemerintahan yaitu untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merupakan tuntutan politik. Perilaku politik merupakan bentuk pola pikir dan tindakan untuk memahami suatu fenomena atau obyek tertentu yang bersifat obyektif. Perilaku politik merupakan aktivitas seseorang untuk dapat memahami persepsi, sikap, tanggapan, keyakinan seseorang terhadap obyek yang kejadian yang ada disekelilingnya yang dipengaruhi lingkungan, pengalaman dan pengetahuan.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan tanggapan, persepsi, sikap dan keyakinan serta sebagai suatu pendekatan pada ilmu politik dimana pelaku politik yang dimaksudkan disini adalah perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan umum.

Dengan kesimpulan diatas maka penulis ingin mengetahuia sejauh mana persepsi, sikap, keyakinan serta tindakan yang akan dilakukan pemilih pemula sebagai obyek yang akan pertama kali memberikan haknya didalam pemilu 2004 ini. Sebab mereka baru pertama kalinya dan disamping itu pula masih perlunya pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti pemilu ini, dan didalam cakupan perilaku politik maka akan dapat diketahui apa yang menjadi kehendak dari rakyat dalam pemilu.

2. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pesta demokrasi yang paling akbar dalam kehidupan kenegaraan adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebagai sarana legitimasi bagi penguasa untuk mendapatkan menjalankan pemerintahannya, karena pemilihan umum melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan segala lapisan masyarakat ikut serta memberikan suaranya tentunya bagi yang telah

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan tanggapan, persepsi, sikap dan keyakinan serta sebagai suatu pendekatan pada ilmu politik dimana pelaku politik yang dimaksudkan disini adalah perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan umum.

Dengan kesimpulan diatas maka penulis ingin mengetahuia sejauh mana persepsi, sikap, keyakinan serta tindakan yang akan dilakukan pemilih pemula sebagai obyek yang akan pertama kali memberikan haknya didalam pemilu 2004 ini. Sebab mereka baru pertama kalinya dan disamping itu pula masih perlunya pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti pemilu ini, dan didalam cakupan perilaku politik maka akan dapat diketahui apa yang menjadi kehendak dari rakyat dalam pemilu.

2. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pesta demokrasi yang paling akbar dalam kehidupan kenegaraan adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebagai sarana legitimasi bagi penguasa untuk mendapatkan menjalankan pemerintahannya, karena pemilihan umum melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan segala lapisan masyarakat ikut serta memberikan suaranya tentunya bagi yang telah

Organisasi Politik berusaha untuk mempengaruhi persepsi, tindakan dan keyakinan masyarakat, supaya mereka memilih Partai-partai Politik tertentu. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Partai politik harus melaksanakan fungsi-fungsinya secara baik seperti komunikasi, sosialisasi dan rekrutmen politik pada masyarakat, agar mereka termotifasi untuk memberikan suara pada pemilihan umum kepada partai politik tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagai mana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Ketentuan umum juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang:

- 1) Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003, Komisi Pemilihan Umum, 1999, hal. 2

Organisasi Politik berusaha untuk mempengaruhi persepsi, tindakan dan keyakinan masyarakat, supaya mereka memilih Partai-partai Politik tertentu. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Partai politik harus melaksanakan fungsi-fungsinya secara baik seperti komunikasi, sosialisasi dan rekrutmen politik pada masyarakat, agar mereka termotifasi untuk memberikan suara pada pemilihan umum kepada partai politik tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagai mana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Ketentuan umum juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang:

- 1) Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ UUD Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003, Komisi Pemilihan Umum, Hal. 2

kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia nomer XIV/MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomer III/MPR/1998 tentang pemilihan umum bahwa, pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

1) Jujur

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara / pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat tidak secara langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan

kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia nomer XIV/MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomer III/MPR/1998 tentang pemilihan umum bahwa, pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

1) Jujur

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara / pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat tidak secara langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Sistem Pemilihan umum.

Konsep yang berkaitan erat dengan badan perwakilan rakyat ialah berupa sistem Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan salah satu fungsi sistem pemilihan umum ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Dengan mempelajari sistem pemilihan umum dalam ruang lingkup yang luas, maka akan ditemui suatu sistem pemilihan umum dalam ruang lingkup yang luas, maka akan ditemui suatu sistem-sistem pemilihan umum yang banyak ragamnya, seperti sistem pemilihan suara terbanyak, sistem pemilihan bertingkat dan mungkin masih banyak lagi sistem pemilihan umum yang lain. Namun hanya didalam pembahasan pada penelitian ini, hanya akan mengacu pada sistem pemilihan umum yang di terapkan di Indonesia.

Sistem Pemilihan Mekanis Dan pemilihan Organik.

a. Sistem Pemilihan Mekanis

Pengertian didalam sistem pemilihan Mekanis, apabila seseorang yang duduk didalam lembaga perwakilan dengan melalui pemilihan umum, maka sifat perwakilan disebut perwakilan politik (*political representation*).¹⁶

¹⁶ Dikatakan D. Searles, *Law and Democracy in the United States*, C. M. C. P. 1964, hal. 100.

Secara umum perwakilan semacam ini mempunyai kelemahan karena yang terpilih adalah orang yang populer, karena reputasi politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis pemerintah, perekonomian dan sebagainya.

Dalam sistem mekanis, partai-partai mengorganisasikan para pemilih, dan disinilah partai-partai politik berkembang baik menurut sistem satu partai (*one party system*), dua partai (*two party system*) seperti yang dianut liberalisme mengutamakan individu-individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antara individual yang bersifat kontratual, sedangkan Sosialisme terutama komunisme mengutamakan totalitas kolektif masyarakat, dan mengecilkan peranan individu-individu dalam kolektif ini.

Sistem pemerintahan mekanisme biasanya dilaksanakan dengan 2 (dua) sistem pemilihan umum, yaitu : Sistem pemilihan Distrik (sistem pemilihan mayoritas / *single member constituency*) dan Sistem pemilihan proposional (sistem perwakilan berimbang / *multi member constituency*)¹⁷

1) Sistem Pemilihan Distrik

Ada dua karakter utama yang membedakan sistem distrik dari sistem-sistem yang lainnya yaitu

- Bahwa dalam mengenal calon yang akan di pilihnya, maka massa pemilih akan terhindar dari praktek “ membeli kucing dalam karung “ sebagaimana sering terjadi dalam pemilihan sistem daftar. Didalam sistem distrik akan sulit kiranya bagi organisasi politik untuk “mengelabui” rakyat tentang keadaan calon-calonnya, sebab para pemilih akan memilih calon yang dirasanya baik, yaitu orang yang dikenal sepak terjangnya.

Adapun kelemahan dari sistem distrik ini adalah :

- Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan moyoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.
- Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak di perhitungkan sama sekali dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang. Hal ini yang dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan.¹⁹

Jika dilihat dari beberapa hal diatas, perlu adanya usaha agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Maka diperlukan suatu kondisi masyarakat yang memungkinkan sistem tersebut dapat beroperasi. Kondisi yang umum untuk ini adalah bahwa

dalam lingkungan sendiri. Badan perwakilan adalah bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup yang biasa disebut dewan komparati.

Jika dilihat dari susunan MPR yang terdiri dari DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan wakil-wakil golongan fungsional, maka UUD 1945 menganut baik system pemilihan mekanis (pencalonan anggota DPR oleh partai-partai) maupun system pemilihan organis (utusan daerah atau utusan golongan).

Sistem Pemilu 2004

Berdasarkan pasal.6 Undang-Undaang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan rakyat daerah, Sistem pemilihan umum tahun 2004 adalah:

- Ayat 1 : pemilu untuk memilih anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dilaksanakan dengan sistem pfroposional dengan daftar calon terbuka.
- Ayat 2 : pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.²³

Sistem proposional dengan daftar calon terbuka

Dengan sistem terbuka, daftar calon anggota DPR disusun oleh pengurus partai, tetapi yang menentukan terpilih atau tidaknya calon tersebut adalah rakyat, hal ini juga memberikan aspirasinya karena bisa

²³ UU Republik Indonesia, *Op. Cit*, Hlm 07

putaran pertama. Artinya, jika pada pemilihan putaran pertama tidak ada seorangpun kandidat yang berhasil mengumpulkan suara mayoritas, kemudian digelar pemilihan putaran kedua dengan hanya diikuti oleh dua kandidat yang pada putaran pertama berhasil memperoleh suara terbesar. Formula ini dapat menjamin pemenang berdasarkan suara mayoritas.

3. Partai Politik

Menurut Meriam Budiharjo "Partai politik" adalah :

Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²⁵

Menurut Carl J. Friedrich: "Partai Politik" adalah :

Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatannya yang bersifat adil maupun materiil.²⁶

Menurut R.H Soltau: "Partai Politik" adalah :

Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.²⁷

Adapun fungsi Partai Politik adalah sebagai berikut:

a. Partai politik sebagai sarana.

- 1) Sebagai penghubung yang menampung arus informasi baik dari pemerintahan / penguasa untuk yang dipengaruhi atau sebaliknya.

e. Sarana dan pengaturan konflik

- 1) Didalam masyarakat wajar terjadi perbedaan pendapat dan persaingan
- 2) Perbedaan dan persaingan ini dapat mengakibatkan konflik sehingga diharapkan partai politik maupun mengolah dan meminimalisir konflik
- 3) Konflik dapat terjadi dalam partai sendiri maupun antar partai.²⁸

4. Pemilih Pemula

Pemilih pemula yang di konotasikan pemegang hak pilih pertama kali mencoblos pada pemilu.

Pemilih pemula menurut Ganewati Wuryandari disebut pemilih muda yaitu "seseorang yang baru pertama kali ikut pemilihan umum."²⁹

Penyusun cenderung menyebut pemilih pemula, dikarenakan dengan cara membahas definisi tiap kata, jauh diperoleh kebenaran definisi. Pemilih pemula terdiri dari kata 'pemilih' dan kata 'pemula'. Pemilih menurut kamus umum besar bahasa Indonesia adalah 'orang yang memilih dengan sangat teliti', sedangkan kata pemula adalah seseorang yang mula-mula melakukan sesuatu.

Jadi pemilih pemula adalah seseorang yang mula-mula diberi kesempatan untuk memilih dengan sangat teliti terhadap sesuatu obyek

²⁸ *Ibid*, Hlm 165-166

²⁹ Ganewati Wuryandari, *Partai Indonesia dan Pemilihan Umum 1993* (Jakarta: ...)

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan keadaan karang taruna serta perilaku pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2004.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh dari responden dan berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut yaitu pemuda-pemudi yang ada di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.³¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter tentang daerah penelitian, misalnya saja mengenai keadaan geografis.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Quisioner

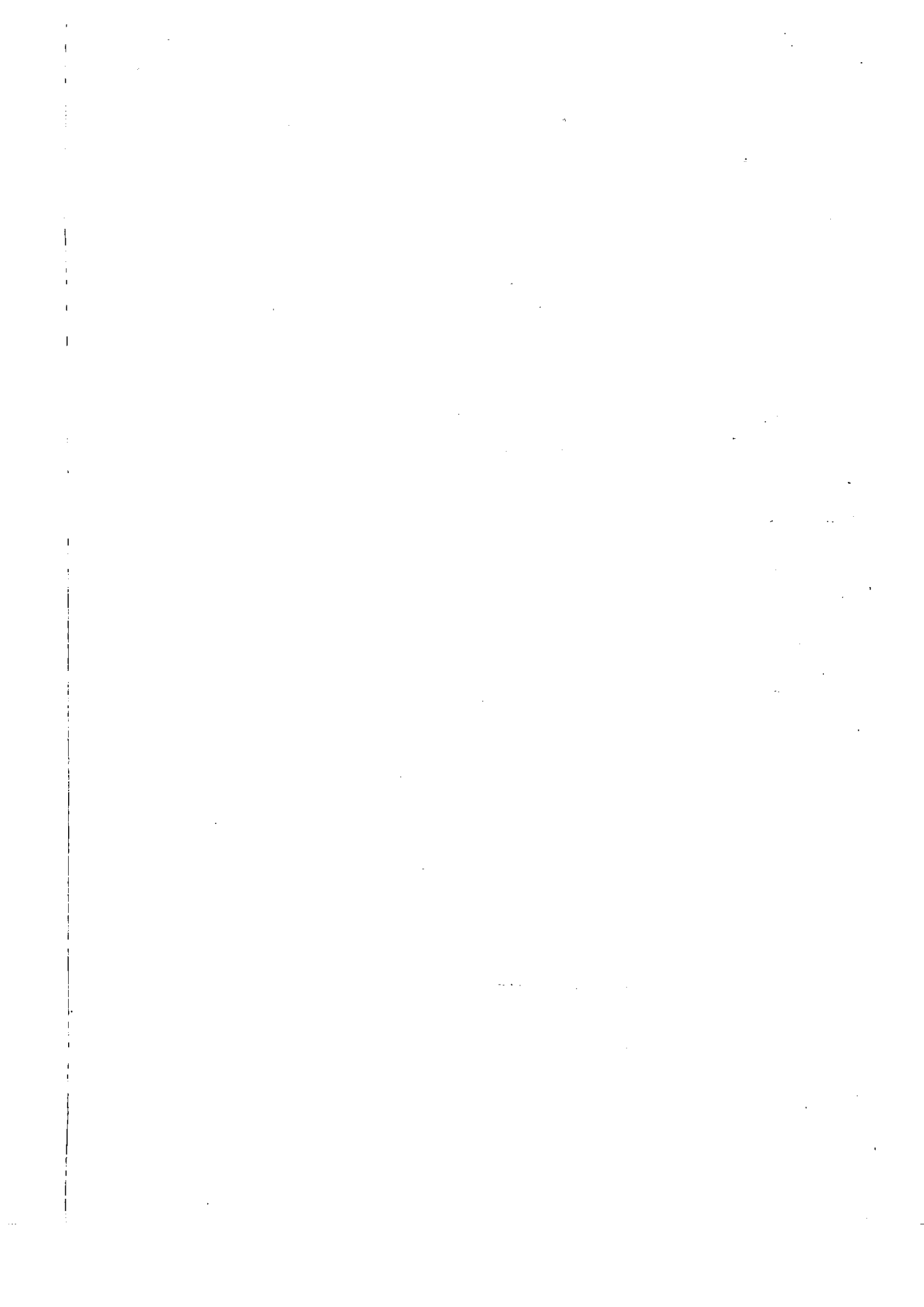
Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya.³³

Quisioner dibuat untuk dapat memperoleh data untuk mengupas definisi operasional. Sehingga quisioner ditujukan untuk anggota karang taruna yang baru pertama kalinya memberikan hak

³¹ Drs, Muchamad Zaenuri, *Diktat Kuliah, Metode penelitian Sosial*, 1999.Hlm 56

³² *Ibid*, Hlm 56

³³ *Kontribusi... Metode Penelitian Masyarakat*, GPT Gramedia, Jakarta, 1991.Hlm 228



b. Interview

Yang dimaksud dengan interview adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat mitra yang lain dengan mendengarkan dengan telinga sendiri.³⁵

Interview dilakukan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data tersebut interview diperuntukan oleh anggota KPPS, pengurus karang taruna, dan anggota karang taruna yang baru pertama kalinya memberikan haknya dan disebut pemilih pemula.

Jadi metode interview merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung terdiri dari dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dalam kedudukan yang berbeda, yaitu antara penulis dengan interview dengan subyek penelitian yang telah ditentukan. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan didesa Trihanggo, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta

c. Dokumentasi

Yang dimaksud metode dokumentasi adalah penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui dokumentasi.³⁶

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rseach*, Andi offset, Yogyakarta 1994, Hlm 4

³⁶ Ibid

2) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

3) Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

4) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah / pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan status sosial.

5) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan pelaksanaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara

- Didalam sistem distrik, pemilihan dikaitkan secara langsung dengan adanya satu daerah Pemilihan yang disebut " distrik ". Biasanya distrik pemilihan ini tidak identik dengan suatu pembagian wilayah administratif, merupakan sebuah wilayah yang garis-garis perbatasannya distrik sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan syarat-syarat Pemilihan Umum. Dalam hal ini tidak menjadi masalah kalau bagian-bagian dari suatu daerah administratif yang lain menjadi satu distrik.
- Yang menjadi fokus pemilihan di dalam sistem distrik bukanlah suatu organisasi politik, melainkan seseorang individu yang mewakili atau di calonkan oleh partai-partai disuatu distrik. Para politisi yang berdomisili di suatu distrik tidak boleh mewakili rakyat diluar distrik tersebut.¹⁸

Kebaikan dari sistem pemilihan distrik ini, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sistem ini keadaan masyarakatnya relatif saling kenal antara rakyat pemilih dengan wakil yang dipilihnya (bahkan mungkin keluarganya), akan memudahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pertanggung jawaban dari wakil-wakilnya dikemudian hari.

¹⁸ N...

b. Sistem Pemilihan Organisme

Sistem ini, memandang rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup yang meliputi:

- 1) Persekutuan hidup geologis (berdasarkan keturunan): rumah tangga.
- 2) Persekutuan hidup teritorial (berdasarkan tempat tinggal): desa, kota, daerah.
- 3) Persekutuan hidup fungsional spesial: cabang industri.
- 4) Lapisan-lapisan sosial: buruh, tani, nelayan, majikan.
- 5) Lembaga-lembaga sosial: Universitas institut, sekolah tinggi, akademi.²²

Dari lima (5) keanekaragaman persekutuan hidup dapat dijelaskan bahwa, rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup secara bersama-sama dalam keanekaragaman warna persekutuan rakyat juga di pandang sebagai suatu organisme atas organ-organ yang memiliki kedudukan dan fungsi tertentu. Persekutuan hidup inilah yang menjadi hak untuk mengutus waki-wakil kepada badan perwakilan masyarakat (rakyat).

Dalam system pemilihan organisme, partai-partai /organisasi-organisasi politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh masing-masing persekutuan hidup

²² Wolhoff, *Op.Cit*, Hlm. 171-172

dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan.²¹

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh sistem perwakilan berimbang ini adalah:

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus kearah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Mereka lebih cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Umumnya sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.
- b. Banyaknya partai mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil. Oleh karena umumnya berdasarkan dari koalisi dua partai atau lebih. Sistem ini dilaksanakan di Negara Belanda, Belgia Spanyol, dan Indonesia.
- c. Wakil yang dipilih merasa dirinya lebih terikat pada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan oleh karena dianggap bahwa dalam pemilihan semacam ini partai lebih menonjol peranannya dari pada kepribadian seseorang. Hal ini memperlambat kedudukan pimpinan partai

rakyat telah mencapai tahap kedewasaan tertentu, yang dapat diukur dengan dua tolak ukur yaitu tingkat kasadaraan politik dan tingkat rasionalitas masyarakat.

Sebagaimana halnya bahwa dengan menggunakan sistem-sistem pemilihan lainnya, melaksanakan sistem distrikpun sangat tergantung pada bagaimana demokrasi dipraktekkan.²⁰

2) Sistem pemilihan proposional

Sistem pemilihan proposional adalah sistem pemilihan umum dimana kursi yang tersedia diparlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan kepada partai-partai / golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan sumbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan.

Sistem perwakilan berimbang / proposional ini mempunyai satu keuntungan yang besar, yaitu bahwa sistem ini bersifat representatif dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-golongan kecilpun, dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogen sifatnya, umumnya lebih tertarik pada sistem ini, oleh karena

²⁰ Nazaruddin Samsudin, *Op.Cit*, Hlm. 144

langsung anggota masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya karena bisa langsung melihat daftar wakilnya kelak di legislatif.

Dengan sistem ini masyarakat tidak lagi memilih partai melainkan memilih orang yang dicalonkan oleh partai tersebut. Pemilihan calon wakil rakyat secara langsung ini diharapkan dapat membuat para calon lebih berkualitas dan bertanggung jawab. Selain itu, para calon tersebut tidak lagi mendompleng kebesaran partainya.²⁴

Sistem proporsional daftar terbuka mengacu pada ketetapan (Tap) MPR No. IV /1999 Tentang GBHN 1999-2004 yang mengamanatkan penyelenggaraan pemilu secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya.

Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kita anut menggunakan sistem pemilihan dua putaran. Artinya, jika pasangan Capres tidak berhasil mengumpulkan 50 persen plus satu suara dan 20 persen diantaranya tersebar di separuh jumlah propinsi, maka diadakan Pemilu Presiden tahap kedua.

Dalam konsep politik, sistem pemilihan Presiden seperti itu dikelompokkan dalam rumpun sistem pemilihan mayoritarian dengan varian formula majority runoff. Formula ini adalah pemilihan yang diikuti oleh hanya dua kandidat yang memperoleh suara terbesar pada pemilihan

²⁴ Muhammad Taufik, *Proposional Daftar Terbuka Format pemilu Aspiratif*, pikiran Rakyat, Jakarta, 2003

- 2) Sebagai Penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan, parpol menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi atau kepentingan yang ada dalam masyarakat.

b. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Disamping itu, sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari generasi berikutnya.

Sarana sosialisasi politik.

- 1) Mengajarkan ideologi partai terhadap anggota
- 2) Mengajarkan norma yang berlaku dalam sistem politik
- 3) Mengajarkan kesadaran berbangsa dan bernegara

c. Sarana artikulasi kepentingan

- 1) Dilakukan dalam rangka komunikasi dua arah dari masyarakat ke pemerintah
- 2) Fungsi ini lebih banyak ditemukan dinegara demokratis
- 3) Dilakukan juga oleh media massa, kelompok kepentingan

d. Sarana Partisipasi politik

- 1) Untuk menarik minat, agar warga negara aktif dan bersedia menjadi anggota partai politik
- 2) Berkaitan dengan fungsi rekrutmen politik

b. Interview

Yang dimaksud dengan interview adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat mitra yang lain dengan mendengarkan dengan telinga sendiri.³⁵

Interview dilakukan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data tersebut interview diperuntukan oleh anggota KPPS, pengurus karang taruna, dan anggota karang taruna yang baru pertama kalinya memberikan haknya dan disebut pemilih pemula.

Jadi metode interview merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung terdiri dari dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dalam kedudukan yang berbeda, yaitu antara penulis dengan interview dengan subyek penelitian yang telah ditentukan. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan didesa Trihanggo, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta

c. Dokumentasi

Yang dimaksud metode dokumentasi adalah penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui dokumentasi.³⁶

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rseach*, Andi offset, Yogyakarta 1994, Hlm 4

³⁶ Winarno Surachmad, *Pengamat Metodologi Ilmiah*, (Tarsito, Bandung, 1992) Hlm.93

suaranya pada pemilu legislatif 2004 ini dan mempunyai kriteria usia 17-21 tahun.

Menurut Sofian Effendi ada empat jenis pertanyaan, yaitu:

1) Pertanyaan Tertutup

Yaitu pertanyaan yang kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain.

2) Pertanyaan Terbuka

yaitu pertanyaan yang kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban.

3) Pertanyaan Kombinasi Tertutup dan Terbuka.

Yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah tersusun tetapi masih ada kemungkinan jawabannya.

4) Pertanyaan Semi Terbuka

yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah tersusun tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawabannya.³⁴

Berdasarkan pendapat diatas maka didalam penelitian, penulis memutuskan untuk menggunakan kuisisioner jenis pertanyaan tertutup. Sedangkan dalam penyampaiannya digunakan Quisioner tipe penyampaian secara langsung yang dituikan kepada responden yaitu

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan keadaan karang taruna serta perilaku pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2004.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh dari responden dan berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut yaitu pemuda-pemudi yang ada di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.³¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter tentang daerah penelitian, misalnya saja mengenai keadaan geografis.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Quisioner

Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya.³³

Quisioner dibuat untuk dapat memperoleh data untuk mengupas definisi operasional. Sehingga quisioner ditujukan untuk anggota karang taruna yang baru pertama kalinya memberikan hak

³¹ Drs, Muchamad Zaenuri, Diktat Kuliah, *Metode penelitian Sosial*, 1999.Hlm 56

³² Ibid, Hlm 56

³³ *Konsep dan Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1991.Hlm 228

2. Keyakinan pemilih pemula terhadap pemilu legislatif 2004

Dalam penelitian ini diukur melalui keyakinan pemilih pemula mengenai visi dan misi yang dikampanyekan partai, visi dan misi yang dikampanyekan caleg, dan kemampuan caleg dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

3. Sikap pemilih pemula terhadap pemilu legislatif 2004

Dalam penelitian ini diukur melalui sikap pemilih pemula terhadap sosialisasi dan kampanye dari parpol, sosialisasi dan kampanye dari caleg, sosialisasi dari KPU tentang pemilu 2004, dan pemilu legislatif yang mampu merubah kehidupan ke arah yang lebih baik (karir, berbangsa dan bernegara).

4. Tindakan pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2004

Dalam penelitian ini diukur melalui tindakan dalam menggunakan hak suara pada saat pencoblosan, dan golput.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau menjelaskan keadaan obyek atau subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta yang ada.³⁰

2. Pemilihan Umum

Suatu cara atau sarana yang tersedia bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya termasuk memilih presiden dan wakil presiden.

3. Partai Politik

Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-angotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama tujuan kelompok ini adalah untuk mencari kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya melalui konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

4. Pemilih Pemula

Semua warga negara yang telah memenuhi syarat minimal 17 tahun atau sudah menikah yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberi kesempatan pertama kali untuk memilih dengan sangat teliti sebagai pemilih aktif dalam pemilu.

F. Definisi Operasional

Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2004 akan dilihat dari aspek – aspek berikut:

1. Persepsi pemilih pemula terhadap pemilu legislatif 2004

Dalam penelitian ini diukur persepsi pemilih pemula mengenai pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali, sosialisasi dari KPU tentang sistem pemilu, kampanye yang dilakukan oleh masing-masing parpol, kampanye yang dilakukan oleh caleg, dan kampanye yang dilakukan menjelang pemilu.

tertentu. Pemilih pemula yang menjadi obyek yang diteliti adalah anggota karang taruna yang menjadi kriteria adalah anggota karang taruna yang baru pertama kalinya memberikan haknya untuk memilih dalam pemilu legislatif 2004. Pemilih pemula didalam anggota karang taruna mempunyai usia sekitar 17-21 tahun yang diperkirakan dalam pemilu tahun 1999 belum dapat memilih sebab belum mencukupi usianya untuk memberikan hak sebagai pemilih sehingga didalam pemilu 2004 ini anggota karang taruna yang berumur 17-21 tahun tersebut diperkirakan baru memberikan hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

E. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah bahwa dalam tahap ini berusaha untuk mendapat menjelaskan mengenai perbatasan pengertian suatu konsep lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi hal-hal yang perlu diamati.

1. Perilaku Politik

Merupakan pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintah. Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan, juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobbying dan lain sebagainya.

Pengambilan dokumentasi dilakukan untuk dapat mengetahui segala aktivitas karang taruna, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa trihanggo, dan proses pemilihan umum 2004 ini.

Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa keterangan yang dikutip dari sumber – sumber dokumentasi yang diperoleh dari pemerintah setempat dan masyarakat yang terlibat didalamnya.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Adalah keseluruhan dari orang yang dijadikan obyek penelitian yaitu anggota karang taruna yang mempunyai usia sekitar 17-21 tahun yang mana diperkirakan bahwa pada pemilihan tahun 2004 ini baru pertama kalinya memberikan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memberikan hak suaranya di dalam pemilihan umum sebagai pemilih pemula.

Seluruh jumlah pemilih yang berada di lokasi penelitian yaitu 11.060 pemilih. Dan dalam melakukan penelitian, penulis hanya meneliti seluruh anggota karang taruna yang mempunyai usia 17 – 21 tahun sebagai pemilih pemula dalam Pemilu 2004 ini. Sedangkan,

b. Sampel

yaitu satuan unit terkecil pada suatu populasi yang akan dijadikan obyek penelitian. Elemen dalam penelitian ini adalah sebagian dari pemuda anggota karang taruna Bhakti yang mempunyai usia sekitar 17-21 tahun yang pada pemilu 2004 ini baru pertama kalinya diberikan hak untuk memilih. Dalam penentuan sampel mengacu pada pendapat Winarno Surachman, bahwa:

“beberapa peneliti mengatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10 % dan ada pula peneliti yang mengatakan bahwa besarnya sampel minimal 5 % dari jumlah populasi”.³⁷

Dengan menggunakan sampel sebesar 5% dari 1.278 pemilih pemuda anggota Karang Taruna Bhakti maka diperoleh hasil 64 pemilih pemuda dari prosentase pengambilan sampel.

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana (Simple Random sampling). Menurut Sofian Effendi dan Masri singarimbun, yang dimaksud dengan sampel acak sederhana:

“Sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama dipilih sebagai sampel. Apabila besarnya sampel yang diinginkan itu berbeda-beda, maka besarnya kesempatan bagi tiap satuan elementer untuk terpilihpun berbeda pula. Misalnya besar populasi adalah N, sedangkan unsur dalam sampel (sampel size) adalah n, maka besarnya kesempatan bagi setiap satuan elementer untuk terpilih dalam sampel n/N .”³⁸

³⁷ Winarno, Surachmad, *Dasar dan Teknik Reseach Pengantar Metodologi*, Tarsito. Bandung 1989, Hlm 60

³⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op.cit*, Hlm 155-156

5. Teknik Analisa Data

Noeng Muhadjir dalam bukunya “ Metodologi Penelitian Kualitatif” menyatakan bahwa:

“Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain”³⁹

Dalam menganalisa data pada penelitian ini, penulis menggunakan analisa kualitatif. Dalam penyajiannya, data-data dalam penelitian disajikan dalam bentuk penyajian secara kualitatif tersebut, peneliti berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan dengan mendalam tentang kejadian yang sebenarnya terjadi didalam kehidupan masyarakat yang diteliti agar data dapat lebih mudah, dapat dimengerti dan dipahami. Yang menjadi tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena kehidupan masyarakat yang diteliti. Oleh karena itu maka menjadi sangat penting kedudukannya dalam metode penelitian ini.⁴⁰

³⁹ Noeng muhadjir, prof,Dr, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta, Andi offser, 1987, Hlm 117

⁴⁰ Syafri Sairin,Dr.Prinsip, *Metodologi dan Desain Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY,1997.